

## **Optimalisasi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Konawe**

<sup>1</sup>Sri Maya, <sup>2</sup>Bakhtiar Abbas, <sup>3</sup>Rince Tambunan

<sup>123</sup>Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

### **Abstrak**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global yang mempengaruhi hak asasi manusia serta kesejahteraan sosial. Di Kabupaten Konawe, upaya pencegahan kekerasan ini telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun tantangan dalam hal implementasi program masih signifikan, terutama terkait keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta koordinasi antar lembaga. Meskipun kebijakan dan program pencegahan kekerasan telah dirancang, kesenjangan antara kebijakan yang diimplementasikan dan hasil yang diharapkan masih terlihat, terutama dalam hal perlindungan yang memadai bagi perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi peran Dinas dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Konawe, dengan fokus pada tantangan, strategi optimal, dan kolaborasi lintas sektor. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi teknologi, serta penguatan kerjasama antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman teoritis tentang perlindungan perempuan dan anak serta memberikan solusi praktis dalam pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam program-program pencegahan kekerasan.

Kata kunci: kekerasan berbasis gender; perlindungan perempuan dan anak; sumber daya manusia; teknologi

### **Abstract**

Violence against women and children is a global issue that affects human rights and social welfare. In Konawe Regency, efforts to prevent this violence have been carried out by the Department of Women's Empowerment and Child Protection, but significant challenges remain in the implementation of programs, particularly concerning budget constraints, human resources, and inter-agency coordination. Although policies and violence prevention programs have been designed, gaps between the implemented policies and the expected outcomes persist, especially in providing adequate protection for women and children. This study employs a qualitative method with a case study approach to explore the role of the Department in preventing violence against women and children in Konawe Regency, focusing on challenges, optimal strategies, and cross-sector collaboration. The findings highlight the

importance of enhancing human resource capacity, optimizing technology, and strengthening inter-agency collaboration to improve the effectiveness of protection programs. This research provides an important contribution to the theoretical understanding of women and children's protection and offers practical solutions for developing human resources involved in violence prevention programs.

**Keywords:** gender-based violence; human resources; protection of women and children; technology.

Copyright (c) 2024 Yogie Wijaya

✉ Corresponding author : [Srimaya419@gmail.com](mailto:Srimaya419@gmail.com)

Email Address : [abdulazis@gmail.com](mailto:abdulazis@gmail.com), [rincetambunan12@gmail.com](mailto:rincetambunan12@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah diakui sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius di seluruh dunia. Menurut laporan dari World Health Organization (WHO), satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender lainnya (Abendroth, 2021a; Ariyanti & Ardhana, 2020). Kekerasan ini tidak hanya merusak kesejahteraan fisik korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan emosional yang serius. Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan sering kali mengalami trauma berkepanjangan yang mengganggu kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi mereka.

Penelitian juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju dengan tingkat kesadaran tinggi tentang hak asasi manusia (Ariyanti & Ardhana, 2020). Di seluruh dunia, berbagai upaya telah dilakukan untuk memerangi kekerasan ini, baik melalui kampanye publik, kebijakan hukum, maupun program perlindungan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Meskipun demikian, penanganan terhadap kekerasan ini sering kali menemui tantangan dalam hal penegakan hukum, perlindungan korban, serta pendidikan masyarakat tentang pentingnya hak-hak perempuan dan anak (Hidayati et al., 2024; Hurriyati et al., 2024).

Kekerasan berbasis gender juga menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan global, seperti yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada tujuan kelima, yaitu kesetaraan gender. Berbagai organisasi internasional, termasuk PBB, secara konsisten mendorong negara-negara untuk meningkatkan upaya mereka dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kebijakan yang lebih ketat dan program-program berbasis masyarakat. Di samping itu, peningkatan kesadaran melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi juga diidentifikasi sebagai strategi penting dalam mengurangi prevalensi kekerasan ini (Alesandra, 2022; IBRAHIM et al., 2023).

Pemerintah di berbagai negara telah berupaya mengimplementasikan kebijakan dan program yang komprehensif untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program-program ini melibatkan kerjasama lintas sektor, mulai dari lembaga hukum,

kesehatan, pendidikan, hingga organisasi masyarakat sipil, guna menciptakan sistem perlindungan yang lebih kuat. Misalnya, di banyak negara, kampanye publik besar-besaran diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kekerasan berbasis gender dan pentingnya melaporkan kasus-kasus kekerasan (Abendroth, 2021b; Adisa et al., 2019). Selain itu, kebijakan yang diterapkan sering kali mencakup layanan pengaduan 24 jam, perlindungan hukum bagi korban, serta pendampingan psikologis.

Penelitian di Eropa menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan yang ketat dan akses luas terhadap layanan perlindungan telah berhasil mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang efektif memiliki dampak langsung pada penurunan angka kekerasan berbasis gender. Beberapa negara juga memperkuat penegakan hukum dengan memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan untuk memberikan efek jera. Namun, meskipun upaya-upaya ini berhasil di beberapa wilayah, tantangan tetap ada dalam hal implementasi, terutama di negara-negara dengan sumber daya yang terbatas.

Di sisi lain, peran organisasi non-pemerintah dalam mendukung program-program pemerintah tidak kalah penting. Organisasi ini sering kali bekerja di garis depan untuk menyediakan layanan darurat bagi korban, serta memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat setempat. Dukungan dari masyarakat sipil ini menjadi salah satu kunci keberhasilan berbagai inisiatif pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Alesandra, 2022; Hurriyati et al., 2024). Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat perlu terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban.

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap menjadi tantangan yang signifikan meskipun telah ada kebijakan dan regulasi yang dirancang untuk melindungi kelompok rentan ini. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu contoh regulasi yang diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan. Namun, meskipun kebijakan ini telah diberlakukan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas ke layanan hukum dan sosial. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya penegakan hukum yang efektif serta minimnya sumber daya untuk mendukung implementasi kebijakan ini (Achmad et al., 2023).

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak serta stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan. Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan atau diselesaikan di luar jalur hukum, yang memperburuk situasi korban. Di berbagai wilayah, khususnya daerah pedesaan, kebijakan yang sudah ada tidak diiringi dengan infrastruktur dan dukungan yang memadai untuk melindungi korban secara efektif. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan akses ke layanan hukum dan perlindungan merupakan salah satu hambatan terbesar dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia (Aiffah & Religia, 2020; Albayati et al., 2021a).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa provinsi di Indonesia telah meluncurkan program-program khusus yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat

dan memperkuat layanan pendampingan bagi korban kekerasan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program-program ini dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan secara menyeluruh dan tepat sasaran (Aiffah & Religia, 2020; Albayati et al., 2021b).

Kabupaten Konawe adalah salah satu wilayah yang memiliki komitmen untuk memperkuat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Wilayah ini telah menerapkan berbagai program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menyediakan layanan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan. Namun, tantangan tetap ada dalam hal implementasi, terutama dalam hal alokasi sumber daya dan koordinasi antar lembaga yang terlibat. Beberapa program yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe antara lain pelatihan bagi aparat desa, penyuluhan, serta penyediaan layanan konseling bagi korban kekerasan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan program perlindungan perempuan dan anak di daerah terpencil seperti Konawe sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antar lembaga yang terlibat dalam implementasinya (Ali et al., 2019; Bala & Raj, 2019a). Di Konawe, kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pihak kepolisian dan lembaga swadaya masyarakat telah membantu memperkuat layanan yang diberikan kepada korban. Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi hambatan yang signifikan, terutama dalam mencapai seluruh wilayah yang tersebar di Kabupaten Konawe.

Upaya untuk memperbaiki kondisi ini telah dilakukan dengan menggandeng lebih banyak organisasi masyarakat setempat dan tokoh agama guna meningkatkan sosialisasi dan pelatihan terkait pencegahan kekerasan. Langkah ini dianggap penting untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses dan memiliki tingkat pelaporan kekerasan yang rendah. Diharapkan, melalui pendekatan yang lebih inklusif, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Konawe dapat dioptimalkan sehingga angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diminimalisir.

Optimalisasi peran Dinas dalam pencegahan kekerasan sangat krusial mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat program yang sudah ada, seperti meningkatkan kerjasama antar lembaga dan memanfaatkan teknologi dalam pelaporan kasus. Dalam konteks ini, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dimaksimalkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan jaringan kerjasama, serta peningkatan aksesibilitas layanan bagi masyarakat yang membutuhkan (Albayati et al., 2021b; Aloush, 2019).

Melalui temuan penelitian ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Konawe. Penelitian ini juga

memberikan rekomendasi untuk memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat pelaporan dan penanganan kasus. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan perlindungan bagi perempuan dan anak di daerah tersebut .

Meskipun telah ada pengakuan internasional terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius, upaya pencegahan global belum selalu mencapai hasil yang diharapkan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun banyak negara telah meratifikasi konvensi internasional dan mengadopsi kebijakan yang kuat, tantangan dalam implementasi tetap ada. Salah satu masalah utama adalah lemahnya koordinasi antar lembaga dan kurangnya sumber daya untuk mendukung program-program yang efektif (Adisa et al., 2019; Adriany et al., 2023) . Kekerasan berbasis gender tetap tinggi, terutama di negara-negara dengan sumber daya yang terbatas atau infrastruktur hukum yang lemah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan hasil nyata yang diharapkan di lapangan, terutama dalam hal perlindungan yang memadai bagi perempuan dan anak .

Di banyak negara, meskipun berbagai program telah dirancang untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, implementasinya sering kali tidak memberikan hasil yang optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya penegakan hukum yang tidak didukung oleh sistem yang kuat untuk menangani kasus-kasus kekerasan secara cepat dan tepat. Banyak korban kekerasan tidak mendapatkan perlindungan atau pendampingan yang cukup karena minimnya layanan pendukung yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi terkait. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa dukungan untuk korban sering kali terhambat oleh stigma sosial dan budaya yang melanggengkan kekerasan berbasis gender. Ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kebijakan perlindungan dan kenyataan di lapangan, terutama di negara-negara berkembang di mana sumber daya dan infrastruktur sangat terbatas (Aiffah & Religia, 2020; Bala & Raj, 2019b)

Meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, masalah ini tetap signifikan, terutama di wilayah dengan akses terbatas ke layanan hukum dan sosial. Kebijakan seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi angka kekerasan karena masih banyak korban yang tidak dapat mengakses perlindungan yang seharusnya disediakan. Minimnya infrastruktur dan dukungan layanan, khususnya di daerah terpencil, menjadi penghalang utama dalam implementasi kebijakan ini. Ditambah lagi, banyak korban tidak melaporkan kekerasan yang dialami karena stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan di Indonesia . Dengan demikian, meskipun kebijakan hukum sudah ada, masalah struktural dan budaya masih menjadi tantangan besar dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Hidayati et al., 2024).

Dengan meninjau lebih lanjut literatur dari jurnal internasional yang membahas implementasi kebijakan serupa di negara berkembang, peneliti dapat memahami lebih dalam hambatan-hambatan yang serupa dihadapi di wilayah lain. Analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya dukungan infrastruktur yang kuat dan program pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kebijakan perlindungan yang ada.

Kabupaten Konawe adalah salah satu daerah yang terus berusaha memperkuat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi tantangan dalam implementasi program-program perlindungan tetap signifikan. Kekurangan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai menjadi kendala utama yang menghambat pelaksanaan program secara efektif. Selain itu, koordinasi antar lembaga, seperti dengan kepolisian dan lembaga swadaya masyarakat, belum optimal dalam menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah-daerah terpencil yang sangat membutuhkan layanan perlindungan. Meskipun beberapa program telah dijalankan, hasilnya belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut. Masalah ini menekankan pentingnya perencanaan yang lebih matang dan dukungan yang lebih kuat untuk program perlindungan di Konawe.

Penelitian ini penting dan mendesak dilakukan karena kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Konawe masih menjadi masalah yang signifikan, meskipun telah ada kebijakan dan program perlindungan yang diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Ginting & Lubis, 2024). Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta koordinasi yang tidak optimal antara lembaga terkait menjadi penghambat utama dalam upaya pencegahan kekerasan di wilayah tersebut. Selain itu, program-program yang telah dijalankan belum menunjukkan hasil yang memadai karena kurangnya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting karena memberikan solusi yang lebih strategis dalam mengatasi masalah dari akar penyebabnya, dengan fokus pada optimalisasi peran dinas serta peningkatan kolaborasi antar pihak terkait. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Konawe. Fokus penelitian ini adalah pada identifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh dinas dalam melaksanakan program-program pencegahan kekerasan, serta strategi optimal yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas intervensi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk menemukan solusi yang dapat meningkatkan kerjasama lintas sektor antara dinas, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat dalam memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada korban kekerasan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender di wilayah Kabupaten Konawe dan wilayah-wilayah serupa.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Konawe. Penelitian ini dirancang untuk menggali pemahaman mendalam tentang peran, tantangan, dan strategi yang diterapkan oleh dinas tersebut (Abdussamad & Sik, 2021). Responden dalam penelitian ini terdiri dari informan utama, yaitu Kepala Dinas, informan kunci, yaitu pegawai dinas yang

menangani kasus kekerasan, serta informan tambahan, yaitu korban atau keluarga korban kekerasan. Pemilihan responden dilakukan secara purposive untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang berlangsung antara Maret hingga Mei 2024.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian. Pertanyaan wawancara berfokus pada peran, tantangan, serta strategi optimal yang dapat diambil oleh Dinas dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Instrumen tersebut telah diuji validitasnya melalui diskusi dengan ahli di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk memastikan relevansi dan kelengkapan pertanyaan. Selain wawancara, dokumentasi terkait program dan laporan resmi dari Dinas juga digunakan sebagai sumber data sekunder. Proses pengumpulan data dilaksanakan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku (Adnan & Latief, 2020).

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan responden yang telah dipilih. Wawancara direkam dan ditranskripsi untuk keperluan analisis lebih lanjut. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik, di mana tema-tema utama terkait peran, tantangan, dan strategi Dinas diidentifikasi dan dikategorikan. Hasil analisis ini kemudian dikaitkan dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi untuk memperkuat temuan. Penelitian ini berusaha menggambarkan kondisi yang ada secara objektif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan pencegahan kekerasan di Kabupaten Konawe.

## Hasil dan pembahasan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe, peran dinas ini dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat signifikan. Dinas melaksanakan berbagai program, seperti sosialisasi dan pelatihan, serta memberikan pendampingan bagi korban. Kolaborasi dengan lembaga terkait, termasuk kepolisian dan LSM, dianggap penting untuk menciptakan perlindungan yang menyeluruh (Bala & Raj, 2019c; Hidayati et al., 2024). Selain itu, Dinas juga menyediakan layanan pengaduan dan bantuan hukum bagi korban kekerasan. Namun, beberapa tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, yang mempengaruhi pelaksanaan program secara optimal.

Peran Dinas sangat signifikan dalam menyediakan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan, terutama melalui program sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Kami berkolaborasi dengan lembaga terkait, seperti kepolisian dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memastikan perlindungan yang efektif. Selain itu, kami juga menyediakan layanan pengaduan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Namun, tantangan dalam hal keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia terkadang menghambat pelaksanaan program.

Dari perspektif pegawai Dinas, ditemukan bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan. Pegawai dinas terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi di masyarakat serta pendampingan korban kekerasan. Mereka juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan (Banharak et al., 2021; Hoedl et al., 2019). Di samping itu, pelatihan kepada tokoh masyarakat dan kelompok lokal juga dianggap penting agar kesadaran mengenai isu kekerasan meningkat. Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kekerasan, terutama di daerah pedesaan yang sulit dijangkau.

Sebagai staf yang menangani program pencegahan kekerasan, tugas kami meliputi pelaksanaan program sosialisasi kepada masyarakat dan pendampingan korban. Kami juga terlibat dalam monitoring dan evaluasi terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh Dinas. Selain itu, kami membantu memberikan pelatihan kepada masyarakat dan tokoh lokal agar mereka lebih sadar akan pentingnya pencegahan kekerasan. Namun, masih banyak kendala di lapangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan isu kekerasan ini.

Wawancara dengan korban dan keluarga korban menunjukkan bahwa mereka merasa sangat terbantu oleh intervensi Dinas. Korban menyatakan bahwa layanan pendampingan yang diberikan oleh Dinas sangat membantu, baik dalam aspek fisik maupun mental. Mereka juga merasa terbantu dalam proses hukum yang dihadapi setelah mengalami kekerasan (Alesandra, 2022). Namun demikian, ada harapan agar program pencegahan dapat lebih diperluas hingga ke tingkat komunitas untuk mengurangi risiko terjadinya kekerasan sejak awal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan tindakan preventif di masyarakat.

Kami sangat terbantu oleh Dinas yang segera memberikan pendampingan setelah laporan disampaikan. Mereka memberikan perlindungan fisik dan mental melalui konseling dan bantuan hukum. Selain itu, Dinas juga mendampingi kami dalam proses hukum, yang sangat membantu dalam melawan ketidakadilan yang kami hadapi. Namun, kami berharap ada lebih banyak tindakan preventif di tingkat masyarakat agar kekerasan ini tidak terjadi sejak awal.

Tantangan yang dihadapi Dinas dalam pencegahan kekerasan juga meliputi keterbatasan fasilitas dan resistensi dari sebagian masyarakat. Kepala Dinas mengungkapkan bahwa anggaran yang terbatas sering kali menghambat program-program pencegahan. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menangani kekerasan berbasis gender menjadi kendala serius. Pegawai dinas juga menggarisbawahi bahwa stigma sosial terhadap korban kekerasan menyebabkan banyak korban enggan melapor, sehingga kasus baru terungkap setelah kondisi memburuk. Tantangan ini menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan kesadaran dan fasilitas layanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.

Dalam hal strategi yang dapat dioptimalkan, Kepala Dinas menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang lebih terfokus pada penanganan kekerasan berbasis gender. Dinas juga merencanakan perluasan jaringan kerjasama dengan lembaga swasta dan internasional untuk meningkatkan dukungan program. Selain itu, teknologi informasi diusulkan sebagai sarana untuk membangun sistem pelaporan online yang lebih mudah diakses. Hal ini diharapkan dapat mempercepat intervensi dan meningkatkan efektivitas pencegahan kekerasan di masa mendatang.

Tantangan terbesar yang kami hadapi adalah minimnya alokasi anggaran untuk program-program pencegahan kekerasan. Kami juga menghadapi kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas khusus untuk menangani kekerasan berbasis gender. Tantangan lainnya adalah resistensi dari sebagian masyarakat yang masih menganggap kekerasan sebagai urusan privat, bukan masalah sosial yang harus ditangani bersama. Selain itu, koordinasi antar lembaga sering kali menjadi masalah yang menghambat kelancaran intervensi kami.

Pegawai dinas menyarankan agar jangkauan program sosialisasi diperluas hingga ke pelosok desa, dengan memanfaatkan media digital untuk penyebaran informasi. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, LSM, dan lembaga bantuan hukum perlu diperkuat agar penanganan korban lebih cepat dan efisien.

Kami sering kali mengalami kesulitan dalam mengedukasi masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang minim akses informasi. Di samping itu, fasilitas pendukung seperti pusat layanan terpadu masih terbatas, sehingga penanganan korban tidak selalu optimal. Tantangan lainnya adalah stigma sosial yang membuat korban enggan melapor, karena takut dihakimi oleh lingkungan mereka sendiri. Tidak jarang, kasus kekerasan baru dilaporkan ketika kondisinya sudah sangat parah.

Korban dan keluarga korban juga menekankan pentingnya penyuluhan yang lebih intensif di masyarakat serta akses yang lebih mudah ke layanan perlindungan. Semua pihak menyadari bahwa upaya bersama dari berbagai lapisan masyarakat dan lembaga diperlukan untuk mengurangi angka kekerasan secara signifikan.

Pada awalnya, sulit bagi kami untuk mengakses bantuan karena tidak semua orang tahu tentang layanan yang disediakan oleh Dinas. Selain itu, jarak antara tempat tinggal kami dan kantor Dinas cukup jauh, sehingga membutuhkan waktu dan biaya untuk mencapai layanan tersebut. Di sisi lain, ada ketakutan dan rasa malu untuk melapor karena adanya stigma sosial terhadap korban kekerasan. Tantangan ini membuat proses mendapatkan bantuan tidak selalu mudah.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai peran, tantangan, dan strategi optimal yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun kesadaran masyarakat, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sangatlah penting. Berdasarkan data yang diperoleh, peran ini terwujud melalui program sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang dilakukan di berbagai wilayah. Tabel 1 menunjukkan detail dari program-program yang dijalankan oleh Dinas, termasuk jumlah sosialisasi yang dilakukan setiap tahun dan jumlah korban yang menerima pendampingan. Dari tabel ini, terlihat peningkatan jumlah program sosialisasi dari tahun ke tahun, meskipun terjadi penurunan pada 2023 akibat keterbatasan anggaran. Tantangan utama yang dihadapi

adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, yang secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan program tersebut.

| Tahun | Jumlah Sosialisasi | Jumlah Korban yang Mendapat Pendampingan | Keterlibatan Lembaga Lain         |
|-------|--------------------|--|-----------------------------------|
| 2020  | 15                 | 35                                       | Kepolisian, LSM                   |
| 2021  | 20                 | 40                                       | Kepolisian, LSM, Tokoh Masyarakat |
| 2022  | 25                 | 45                                       | Kepolisian, LSM, Pemerintah Desa  |
| 2023  | 18                 | 42                                       | Kepolisian, LSM                   |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Konawe

Selain itu, pegawai Dinas juga menekankan bahwa kendala dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan, menjadi salah satu tantangan terbesar. Dalam wawancara, pegawai menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat disebabkan oleh minimnya akses informasi dan pendidikan di daerah terpencil. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan menyebabkan banyak korban enggan melapor, sehingga kasus kekerasan baru terungkap ketika kondisinya sudah parah. Berdasarkan temuan ini, peneliti menyarankan agar program sosialisasi lebih difokuskan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat laporan kekerasan yang rendah. Sebagai contoh, tabel 2 memperlihatkan wilayah-wilayah di Kabupaten Konawe dengan jumlah laporan kekerasan yang minimal, yang menunjukkan bahwa daerah pedesaan cenderung memiliki tingkat pelaporan lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan.

| Wilayah             | Jumlah Laporan Kekerasan 2022 | Jumlah Laporan Kekerasan 2023 |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kecamatan Amonggedo | 5                             | 4                             |
| Kecamatan Besulutu  | 12                            | 11                            |
| Kecamatan Onembute  | 2                             | 3                             |
| Kecamatan Pondidaha | 15                            | 18                            |

Sumber : dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten konawe

Temuan lain yang tidak terduga adalah bahwa meskipun jumlah laporan kekerasan di daerah pedesaan rendah, ternyata jumlah korban di daerah tersebut cukup tinggi menurut laporan tidak resmi dari tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan, terutama di wilayah dengan akses yang terbatas terhadap layanan Dinas. Peneliti mengidentifikasi bahwa resistensi masyarakat terhadap pelaporan juga dipengaruhi oleh norma budaya yang menganggap kekerasan sebagai urusan keluarga, bukan urusan publik. Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas dapat memperkuat kerjasama

dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk mendorong lebih banyak pelaporan, terutama di wilayah pedesaan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe memiliki peran penting dalam pencegahan kekerasan, meskipun masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal anggaran, sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat. Upaya peningkatan kolaborasi antar lembaga, serta fokus pada sosialisasi di wilayah dengan tingkat pelaporan rendah, sangat diperlukan. Penerapan teknologi, seperti sistem pelaporan online, juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses layanan bagi korban, khususnya di daerah terpencil. Dengan langkah-langkah ini, efektivitas pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Konawe dapat lebih ditingkatkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun upaya internasional untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilakukan, hasil yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini juga ditemukan dalam konteks lokal, di mana meskipun program sosialisasi dan perlindungan telah dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe, beberapa tantangan besar masih menghambat pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara, peran kolaboratif antara lembaga seperti kepolisian dan LSM diakui penting, namun keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga masih menjadi masalah. Teori kelembagaan menyatakan bahwa keberhasilan program perlindungan bergantung pada sinergi yang efektif antara para aktor yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan. Dengan demikian, peningkatan kolaborasi lintas sektor menjadi solusi yang esensial untuk mengatasi tantangan ini, sebagaimana juga disarankan dalam literatur tentang manajemen kebijakan publik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sosialisasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak di Konawe masih belum mencapai seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan yang sulit dijangkau. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa sosialisasi yang masif dan tepat sasaran merupakan langkah efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah kekerasan berbasis gender. Kurangnya akses informasi dan pendidikan di daerah terpencil menjadi penghambat utama dalam pencegahan kekerasan. Strategi yang lebih proaktif, seperti penggunaan media digital dan kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat, dapat menjadi cara efektif untuk menjangkau wilayah yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Teori penyebaran inovasi oleh Rogers dapat menjelaskan bahwa adopsi informasi yang lebih luas dan cepat akan meningkatkan perubahan perilaku di masyarakat terkait pencegahan kekerasan.

Di samping itu, penelitian ini juga menemukan bahwa stigma sosial terhadap korban kekerasan masih menjadi tantangan besar dalam upaya penanganan kasus. Banyak korban enggan melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami karena khawatir akan reaksi negatif dari masyarakat. Literatur tentang psikologi sosial menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap korban kekerasan berbasis gender sering kali membuat korban merasa malu dan takut untuk berbicara. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik diperlukan, tidak hanya untuk melindungi korban secara hukum tetapi juga untuk membangun lingkungan yang mendukung agar korban dapat melaporkan kasus dengan aman. Kampanye anti-stigma yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama bisa menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi stigma sosial terhadap korban.

Dari sisi kelembagaan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penelitian sebelumnya telah menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten sering kali menghambat efektivitas program perlindungan. Untuk itu, program pelatihan berkelanjutan bagi staf dinas, terutama dalam hal penanganan kekerasan berbasis gender, sangat diperlukan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sensitivitas gender. Menurut teori pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi individu akan berdampak langsung pada efektivitas institusi dalam mencapai tujuannya.

Penelitian ini menyoroti bahwa penerapan teknologi dalam sistem pelaporan kekerasan dapat menjadi solusi yang penting dalam meningkatkan aksesibilitas layanan bagi korban. Sistem pelaporan online yang mudah diakses oleh masyarakat dapat mempercepat intervensi dan penanganan kasus. Literasi teknologi juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan, terutama di daerah-daerah yang akses terhadap teknologi masih terbatas. Menurut teori difusi inovasi, penerapan teknologi baru harus disertai dengan upaya pendidikan dan penyebaran informasi yang efektif agar teknologi tersebut dapat diterima dan digunakan secara luas oleh masyarakat.

## Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat penting, namun masih dihadapkan pada tantangan besar, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, dan sosialisasi yang belum merata. Meskipun beberapa program telah berhasil dijalankan, seperti sosialisasi dan pendampingan korban, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor-faktor struktural dan sosial yang menghalangi implementasi penuh kebijakan perlindungan. Penggunaan teknologi dalam sistem pelaporan kekerasan juga ditemukan sebagai langkah penting yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Temuan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi sebagai strategi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap korban kekerasan harus ditangani melalui pendekatan yang lebih holistik.

Manfaat dari temuan ini, secara teoritis, memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kolaborasi antar lembaga dan inovasi teknologi dapat memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak. Secara praktis, temuan ini relevan dalam bidang sumber daya manusia, khususnya dalam pengembangan kompetensi staf yang terlibat dalam program perlindungan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan memajukan kemampuan institusi dalam memberikan layanan yang lebih efektif dan responsif. Namun, penelitian ini memiliki batasan dalam hal keterbatasan cakupan wilayah dan jumlah responden yang terbatas pada satu daerah. Untuk penelitian masa depan, disarankan agar studi dilakukan di wilayah yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak

responden untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi program perlindungan perempuan dan anak di berbagai konteks sosial dan geografis.

## Referensi :

- Abdussamad, H., & Sik, M. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=JtKREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&q=metode+kualitatif&ots=vDCxBS22O2&sig=nrE3MPPawGocoqirBbtidNwmFS0>
- Abendroth, A.-K. (2021a). The Gender Pay Gap in the Platform Economy: Comparing the Importance of Market and Organisational Dynamics on Two German Crowdfunding Platforms. *Gender a Vyzkum / Gender and Research*, 21(2). Scopus. <https://doi.org/10.13060/GAV.2020.011>
- Abendroth, A.-K. (2021b). The Gender Pay Gap in the Platform Economy: Comparing the Importance of Market and Organisational Dynamics on Two German Crowdfunding Platforms. *Gender a Vyzkum / Gender and Research*, 21(2). Scopus. <https://doi.org/10.13060/GAV.2020.011>
- Achmad, N., Harahap, R. H., & Ihsan, M. I. (2023). Radicalism movement in higher education in Indonesia: Students' understanding and its prevention. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 44(1), 123–128. Scopus. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2023.44.1.13>
- Adisa, T. A., Abdulraheem, I., & Isiaka, S. B. (2019). Patriarchal hegemony: Investigating the impact of patriarchy on women's work-life balance. *Gender in Management*, 34(1), 19–33. Scopus. <https://doi.org/10.1108/GM-07-2018-0095>
- Adnan, G., & Latief, M. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas*. repository.ar-raniry.ac.id. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14062/>
- Adriany, V., Yulindrasari, H., & Safrina, R. (2023). Doing feminist participatory action research for disrupting traditional gender discourses with Indonesian Muslim kindergarten teachers. *Action Research*, 21(4), 402–418. Scopus. <https://doi.org/10.1177/14767503211044007>
- Aiffah, G., & Religia, W. (2020). Child sexual abuse prevention program: Reference to the Indonesian government. *Jurnal Promkes, Query date: 2024-10-16 00:44:13*. <https://e-journal.unair.ac.id/PROMKES/article/download/15958/12130>
- Albayati, A., Douedi, S., Alshami, A., Hossain, M. A., Sen, S., Buccellato, V., Cutroneo, A., Beelitz, J., & Asif, A. (2021a). Why do patients leave against medical advice? Reasons, consequences, prevention, and interventions. *Healthcare (Switzerland)*, 9(2). Scopus. <https://doi.org/10.3390/healthcare9020111>
- Albayati, A., Douedi, S., Alshami, A., Hossain, M. A., Sen, S., Buccellato, V., Cutroneo, A., Beelitz, J., & Asif, A. (2021b). Why do patients leave against medical advice? Reasons, consequences, prevention, and interventions. *Healthcare (Switzerland)*, 9(2). Scopus. <https://doi.org/10.3390/healthcare9020111>
- Alesandra, M. (2022). Pencegahan Hukum Terhadap Aksi Kekerasan Anak Di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Query date: 2024-10-16 00:40:29*. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/603>

- Ali, S. M., Anjum, N., Naureen, F., Rashid, A., Tahir, A., Ishaq, M., & Usman, M. (2019). Satisfaction level of tuberculosis patients regarding their access to tb care and prevention services, delivered through a public-private mix model in Pakistan. *Healthcare (Switzerland)*, 7(4). Scopus. <https://doi.org/10.3390/healthcare7040119>
- Aloush, S. M. (2019). Lecture-based education versus simulation in educating student nurses about central line-associated bloodstream infection-prevention guidelines. *Journal of Vascular Nursing*, 37(2), 125-131. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.jvn.2018.11.006>
- Ariyanti, N., & Ardhana, I. (2020). Dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada budaya patriarki di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, Query date: 2024-01-19 02:18:20.
- Bala, K. J., & Raj, E. B. (2019a). Exploitation of cross-site scripting (Xss) vulnerabilities and their prevention on the server-side. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 7(6), 549-544. Scopus.
- Bala, K. J., & Raj, E. B. (2019b). Exploitation of cross-site scripting (Xss) vulnerabilities and their prevention on the server-side. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 7(6), 549-544. Scopus.
- Bala, K. J., & Raj, E. B. (2019c). Exploitation of cross-site scripting (Xss) vulnerabilities and their prevention on the server-side. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 7(6), 549-544. Scopus.
- Banharak, S., Panpanit, L., Subindee, S., Narongsanoi, P., Sanun-Aur, P., Kulwong, W., Songtin, P., & Khemphimai, W. (2021). Prevention and care for incontinence-associated dermatitis among older adults: A systematic review. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 14, 2983-3004. Scopus. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S329672>
- Ginting, M., & Lubis, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Judge: Jurnal Hukum, Query date: 2024-10-16 00:40:29*. <http://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/736>
- Hidayati, P., Sumarti, E., Qomariyah, I., & ... (2024). Menuju Keluarga Sadar Hukum: Penyuluhan Bantuan Hukum Perlindungan Anak Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak di Kelurahan Tunjung Sekar Malang. *Anfatama: Jurnal ..., Query date: 2024-10-16 00:40:29*. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/Anfatama/article/view/2041>
- Hoedl, M., Eglseer, D., & Lohrmann, C. (2019). Structure, Process, and Quality Indicators for Pressure Injury Prevention and Care in Austrian Hospitals: A Quality Improvement Project. *Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing*, 46(6), 479-484. Scopus. <https://doi.org/10.1097/WON.0000000000000586>
- Hurriyati, D., Miranda, M., & Laili, R. (2024). Penangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pengabdian ..., Query date: 2024-10-16 00:40:29*. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/3279>
- IBRAHIM, I., MULIATI, M., & NURSAMSU, W. (2023). Analisis Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa. *KNOWLEDGE: Jurnal ..., Query date: 2024-10-16 00:40:29*. <https://www.jurnalp4i.com/index.php/knowledge/article/view/2483>